



## INSENTIF PAJAK DALAM MERESPONS DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR PARIWISATA

Nafis Dwi Kartiko  
Direktorat Jenderal Pajak  
Email: [nafisdwikartiko@gmail.com](mailto:nafisdwikartiko@gmail.com)

---

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[22 Agustus 2020]

Dinyatakan Diterima  
[30 September 2020]

KATA KUNCI:  
Ekonomi, Insentif Pajak, Sektor Pariwisata

KLASIFIKASI JEL:  
K34, L83, Z32

### ABSTRAK

*The social distancing and physical distancing policies due to the COVID-19 pandemic have disrupted the value chain of the business world, causing various impacts on the Indonesian economy, resulting in shocks in sectors in the economy. One of the sectors experiencing the worst shocks is the tourism sector. The policy pursued by the government to reduce these shocks is by providing an economic stimulus in the form of tax incentives. The tax incentives provided have not been able to accommodate all the needs of the Tourism Business in facing the COVID-19 pandemic. This encourages the author to find out the needs of the tourism sector in facing the negative impacts of the COVID-19 pandemic, the benefits of tax incentives in the tourism sector, and alternative tax incentive policy solutions to overcome economic problems in the tourism sector due to the COVID-19 pandemic. This research uses qualitative research methods with the type of library research. The results of this study indicate that there are two needs of the tourism sector that have not been responded to in the tax incentive policy by the government, namely support to increase demand and consumption, and easy access to business credit. The author at the end of the study recommends providing value-added tax incentives to increase demand and consumption, and tax incentives for platforms and lenders in fintech lending for easy access to business credit.*

Kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* akibat pandemi COVID-19 menimbulkan gangguan pada rantai nilai dunia usaha sehingga menyebabkan berbagai dampak pada perekonomian Indonesia yang berakibat timbulnya guncangan pada sektor-sektor dalam perekonomian. Salah satu sektor yang mengalami guncangan terparah adalah sektor pariwisata. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi guncangan tersebut adalah dengan cara memberikan stimulus ekonomi berupa insentif pajak. Insentif pajak yang diberikan ternyata belum dapat mengakomodir semua kebutuhan Usaha Pariwisata dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengetahui kebutuhan sektor pariwisata dalam menghadapi dampak negatif akibat pandemi COVID-19, manfaat insentif pajak pada sektor pariwisata, dan alternatif solusi kebijakan insentif pajak bagaimana yang dapat untuk mengatasi masalah ekonomi pada sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua kebutuhan sektor pariwisata yang belum direspons dalam kebijakan insentif pajak oleh pemerintah, yaitu dukungan untuk menaikkan permintaan dan konsumsi, serta kemudahan akses kredit usaha. Penulis pada akhir penelitian merekomendasikan untuk diberikannya insentif pajak pertambahan nilai untuk menaikkan permintaan dan konsumsi, dan insentif pajak untuk *platform* dan pemberi pinjaman dalam *fintech lending* untuk kemudahan akses kredit usaha.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kasus pneumonia misterius yang penyebabnya tidak diketahui pertama kali ditemukan di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, pada tanggal 8 Desember 2019. Beberapa kelompok pasien pneumonia dengan gejala serupa dilaporkan hingga akhir Desember 2019 (Qiu et al., 2020). Setelah dilakukan identifikasi penyakit tersebut oleh *World Health Organization* (WHO) dinamakan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) (Zu, et al., 2020). Penyakit ini menular dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di Cina dan lebih dari 190 negara. Sampai pada akhirnya tanggal 12 Maret 2020 WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik (Susilo et al., 2020).

Sementara di Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 (Almuttaqi, 2020). Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan seorang perempuan dengan Warga Negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia (Detikcom, 2020). Masifnya penyebaran COVID-19 membuat peningkatan kasus positif virus ini begitu cepat. Terdata hingga 15 Agustus 2020 di Indonesia sudah terdapat 135.123 kasus positif dengan kasus 6.021 orang meninggal dan 89.618 orang dinyatakan sembuh (Sagita, 2020).

Merespon pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan *social distancing* (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), dan *physical distancing* (jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter) sejak awal Maret 2020 (Hadiwardoyo, 2020). Kebijakan tersebut menimbulkan gangguan pada rantai nilai dunia usaha sehingga banyak usaha pada berbagai sektor dan skala usaha yang berhenti operasi sementara atau permanen (Budastra, 2020). Gangguan pada rantai nilai dunia usaha tersebut menyebabkan berbagai dampak pada perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan setidaknya pandemi COVID-19 memberi tiga dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Pertama, membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat jatuh sangat dalam. Padahal konsumsi menopang ekonomi sampai dengan 60 persen. Kedua, adanya ketidakpastian berakibat pada melemahnya investasi. Ketiga, melemahnya ekspor membuat harga komoditas, minyak, batu bara dan CPO menjadi turun (Situmorang, 2020).

Merosotnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat mengakibatkan guncangan pada sektor-sektor dalam perekonomian. Hal ini selaras dengan pernyataan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang menyebut berbagai sektor industri di dalam negeri terdampak oleh pandemi COVID-19 (Bayu, 2020). Budastra (2020) lebih lanjut menjelaskan bahwa sektor dalam perekonomian yang terdampak pada tahap awal adalah sektor pariwisata dan sektor jasa transportasi, kemudian

diikuti oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor jasa lainnya.

Guncangan pada sektor-sektor dalam perekonomian akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi COVID-19 merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh pemerintah (Anderson et al., 2020). Pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam rangka penanganan kasus pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi negaranya perlu melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif COVID-19 pada perekonomian. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, pemerintah dapat menerapkan paket kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan (Gourinchas, 2020). Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan stimulus fiskal dan menuangkannya dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang berlaku sejak 1 April 2020. Bentuk insentif yang diberikan dalam instrumen tersebut antara lain PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, dan Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah.

### Sektor Pariwisata Sebelum Pandemi COVID-19

Salah satu sektor yang mengalami guncangan cukup parah akibat wabah pandemi COVID-19 adalah sektor pariwisata. Menurut KADIN, pukulan tersebut juga dialami oleh turunan sektor pariwisata seperti perhotelan, restoran, transportasi, *airlines* dan dampak tersebut juga dialami oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Bayu, 2020). Padahal sektor pariwisata memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada tahun 2018 merilis hasil penelitiannya terkait dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata secara umum memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia yang digambarkan oleh efek pengganda (*multiplier effect*) di Indonesia. Efek pengganda menyebabkan seluruh pengeluaran wisatawan, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah memberikan dampak ekonomi berupa pertambahan *output*, nilai tambah, pendapatan, dan penciptaan tenaga kerja di Indonesia (LPEM FEB UI, 2019).

Kementerian Pariwisata (2018) memberikan data terkait realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional tahun 2017, data tersebut menunjukkan sektor pariwisata berkontribusi sebesar 4,11% PDB Nasional. Apabila semakin tinggi kontribusi PDB sektor pariwisata, maka semakin penting pula posisi sektor kepariwisataan

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. LPEM FEB UI (2018) menyatakan bahwa sektor pariwisata memberikan dampak positif pada aliran devisa masuk. Selain itu, jasa perjalanan sebagai salah satu unsur dalam sektor pariwisata menunjukkan secara konsisten berkontribusi positif terhadap neraca jasa dengan nilai yang semakin meningkat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020, sebelum pandemi COVID-19 memasuki Indonesia jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada bulan Januari 2020 mengalami kenaikan 5,85 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada bulan Januari 2019. Sementara itu, jika dibandingkan dengan bulan Desember 2019, jumlah kunjungan wisman pada Januari 2020 mengalami penurunan sebesar 7,62 persen. Apabila dibandingkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, maka kunjungan wisman ke Indonesia menunjukkan *trend* yang meningkat. Jumlah kunjungan wisman selama 2019 merupakan jumlah tertinggi dalam periode tersebut. Selama 2019 jumlah kunjungan wisman mencapai 16,11 juta kunjungan atau naik 1,88 persen dibanding jumlah kunjungan selama 2018 yang tercatat 15,81 juta kunjungan (BPS, 2020).

#### Sektor Pariwisata Saat Pandemi COVID-19

Setelah pandemi COVID-19 memasuki Indonesia jumlah kunjungan wisman ke Indonesia menunjukkan *trend* yang menurun. BPS (2020) mencatat jumlah kunjungan wisman ke Indonesia periode Mei 2020 mengalami penurunan sebesar 86,90 persen dibanding jumlah kunjungan pada Mei 2019. Selain itu, jika dibandingkan dengan April 2020, jumlah kunjungan wisman pada Mei 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,10 persen (BPS, 2020). Secara kumulatif (Januari–Mei 2020), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 2,93 juta kunjungan atau turun 53,36 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 6,28 juta kunjungan. Berdasarkan *Briefing Note* LPEM FEB UI dalam Suhud (2020), wisman mengalami penurunan drastis seiring pengurangan penerbangan internasional. Wisatawan domestik juga mengalami penurunan drastis sejak pandemi COVID-19, dan akan semakin memburuk seiring *social and physical distancing*.

Mengingat bahwa sektor pariwisata memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian Indonesia, maka diperlukan langkah-langkah yang strategis untuk memulihkan sektor ini. Insentif pajak sebagai salah satu langkah strategis yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan stimulus terhadap sektor pariwisata sehingga dapat menjadikan sektor ini bangkit dan tumbuh kembali. Meskipun demikian insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah ternyata belum dapat mengakomodir seluruh keinginan sektor pariwisata dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai salah satu contoh, sampai dengan penelitian ini dibuat pemerintah belum memberikan pembebasan angsuran PPh Pasal 25 secara penuh terhadap sektor ini, padahal Menteri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio telah mengusulkan pembebasan angsuran PPh Pasal 25 secara penuh (Waseso, 2020). Pemerintah sampai dengan penelitian ini dibuat belum menerbitkan peraturan bidang perpajakan untuk mendorong konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat untuk sektor pariwisata, sehingga penulis tertarik untuk mencari informasi yang lebih mendalam terkait kebijakan insentif pajak dalam merespons kebutuhan sektor pariwisata untuk menghadapi pandemi COVID-19.

#### 1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui kebutuhan sektor pariwisata dalam menghadapi dampak negatif akibat pandemi COVID-19, manfaat insentif pajak pada sektor pariwisata, dan memberikan alternatif solusi kebijakan insentif pajak dalam mengatasi masalah ekonomi pada sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19.

### 2. KERANGKA TEORI

#### 2.1. Sektor Pariwisata

##### Definisi Pariwisata

Sesungguhnya, pariwisata telah lama menjadi perhatian, baik dari segi ekonomi, politik, administrasi kenegaraan, maupun sosiologi, sampai saat ini belum ada kesepakatan secara akademis mengenai apa itu pariwisata (Suwena & Widyatmaja, 2017). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pariwisata diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi. Dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang RI nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Yoeti dalam Suwena & Widyatmaja (2017) memberikan definisi pariwisata sebagai aktivitas perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan demikian, pariwisata dapat diartikan sebagai suatu aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan

rekreasi atau pengembangan pribadi untuk sementara waktu, dan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain.

Menurut Daly dan Gereff dalam Nhamo et al (2020), terdapat dua tipe perjalanan wisata yaitu wisata untuk tujuan rekreasi (wisata rekreasi) dan wisata untuk tujuan bisnis (wisata bisnis). Wisata rekreasi dapat diartikan sebagai setiap perjalanan yang dilakukan turis untuk memperoleh kesenangan. Bentuk wisata rekreasi contohnya wisata alam, wisata petualangan, dan wisata kebudayaan. Sedangkan wisata bisnis adalah sebuah perjalanan untuk kepentingan profesional, termasuk didalamnya bertemu dengan klien, perjalanan untuk melihat potensi investasi, dan perjalanan untuk mengikuti konferensi. Dalam penelitian ini akan dibahas secara integral bagaimana kebutuhan sektor pariwisata selama pandemi COVID-19 baik untuk wisata rekreasi maupun wisata bisnis dalam konteks insentif pajak.

### Usaha dalam Sektor Pariwisata

Usaha dalam sektor pariwisata atau dapat juga disebut sebagai Usaha Pariwisata, secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan). Definisi Usaha Pariwisata dalam UU Kepariwisataan adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Dalam Bab VI Pasal 14 UU Kepariwisataan, usaha pariwisata meliputi, antara lain

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

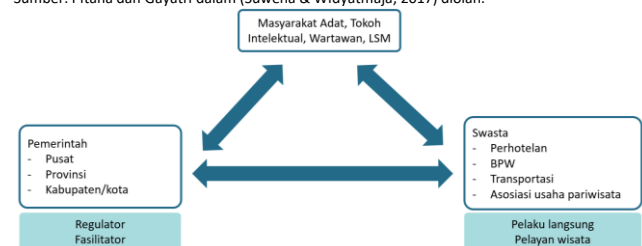
Usaha Pariwisata selain yang telah disebutkan sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri. Selain usaha yang telah disebutkan dalam UU Kepariwisataan, terdapat turunan sektor pariwisata seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan *airlines* yang memiliki hubungan erat satu dengan yang lainnya. Suwena & Widyatmaja (2017) menyebutkan bahwa usaha pariwisata merupakan produk gabungan (*composite product*), campuran dari berbagai obyek dan atraksi wisata (*tourist attractions*), transportasi (*transportation*), akomodasi (*accommodations*) dan hiburan (*entertainment*). Sehingga, usaha sektor pariwisata dalam penelitian sesungguhnya bukan hanya sebagaimana yang dimaksud dalam UU Kepariwisataan saja, tetapi cakupannya lebih luas termasuk seluruh turunan sektor pariwisata yang terkait satu dengan yang lainnya.

### Pilar dalam Sektor Pariwisata

Secara umum, insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu (1) masyarakat, (2) swasta, (3) pemerintah. Yang termasuk masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan. Termasuk ke dalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa. Selanjutnya dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya (Suwena & Widyatmaja, 2017).

### Gambar 1 Sektor Pariwisata dalam tiga pilar

Sumber: Pitana dan Gayatri dalam (Suwena & Widyatmaja, 2017) diolah.



Dalam membuat suatu kebijakan yang berdampak pada sektor pariwisata, hendaknya pemerintah mempertimbangkan masyarakat dan swasta sebagai pelaku dalam sektor ini. Kebijakan yang akan dibuat harus mengakomodir kebutuhan seluruh pelaku agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha. Penyelenggaraan sistem pariwisata dapat berjalan dengan sempurna bila komponen-komponen tersebut melebur menjadi satu dan saling mendukung satu dengan lainnya. Seperti kewajiban pemerintah daerah adalah bersama-sama merencanakan, pembangunan, pengorganisasian, pemeliharaan dan pengawasan dengan pemerintah daerah lainnya dalam segala sektor yang mendukung kegiatan pariwisata. Demikian pula masyarakat di sekitar obyek dan atraksi wisata harus ikut berpartisipasi yang diwujudkan ke dalam tindakan memberikan perasaan aman yang berupa keramahan dan perasaan yang tulus ketika menerima kedatangan wisatawan. Melihat keterkaitan sebelumnya, penelitian ini akan menguraikan faktor apa saja yang mendorong pemerintah dalam memberikan insentif. Pertanyaan mendasarnya apakah pemerintah telah berkoordinasi dengan pilar utama lainnya dalam sektor pariwisata dalam membuat kebijakan insentif pajak.

### 2.2. Insentif pajak

Insentif pajak merujuk pada ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan dapat berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan tarif pajak khusus atau penangguhan kewajiban perpajakan. Bentuk insentif fiskal itu sendiri dapat berupa pembebasan pajak dalam periode tertentu, dapat dikurangkannya sebuah biaya atas jenis pengeluaran tertentu atau pengurangan tarif impor atau pengurangan tarif bea dan cukai (UN & CIAT, 2018).

Cambridge Dictionary mengartikan insentif pajak sebagai *"a reduction in taxes that encourages companies or people to do something that will help the country's economy"*. Secara umum insentif pajak dapat diartikan sebagai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang umumnya berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara. Ketentuan ini diberikan oleh negara dalam rangka membantu perekonomian negara. Dalam penelitian ini akan dibahas insentif pajak pada sektor pariwisata, serta bagaimana manfaat insentif tersebut dan adakah alternatif solusi dalam mengatasi kebutuhan sektor pariwisata akibat adanya pandemi COVID-19.

### 2.3. Segmen Pariwisata yang Terkena Dampak COVID-19

Nhamo et al (2020) memberikan daftar terkait masalah utama dan membutuhkan paket stimulus pada sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19, antara lain sebagai berikut:

- dampak pada bandara, maskapai penerbangan, layanan darat dan udara terkait
- dampak sektor kapal pesiar
- pemutusan hubungan kerja di sebagian besar restoran dan bar
- penurunan permintaan terhadap tur secara berkelompok
- penurunan jumlah kunjungan wisatawan
- penurunan signifikan pemesanan kamar
- dampak pada ritel seperti gerai souvenir
- penurunan permintaan terhadap *travel outbound* untuk domestik dan internasional
- dampak pada agen perjalanan, toko grosir dan operator tur.

Pada penelitian ini akan dibahas apakah masalah yang disampaikan oleh Nhamo et al tersebut telah diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dengan fokus pembahasan hanya pada insentif pajak untuk mengurangi dampak negatif akibat COVID-19.

### 2.4. Penelitian Terdahulu

Belum banyak penelitian terdahulu yang membahas terkait insentif pajak dalam merespons pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata. Akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pokok pembahasan tersebut. Sebagai contoh, Budiyantri (2020) mengemukakan bahwa dampak pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak perusahaan travel dan penerbangan yang mengalami kerugian akibat penghentian penerbangan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan impor hewan hidup dari Cina dan penghentian penerbangan dari dan ke Cina. Padahal selama ini perekonomian pariwisata Indonesia bergantung pada Negara Cina. Ketergantungan tersebut dapat terlihat pada sektor pariwisata yang berada di Provinsi Bali, sehingga penulis memilih studi kasus di Provinsi Bali sebagai cerminan bahwa dampak tersebut sangat signifikan.

Penelitian yang dilakukan Nhamo et al (2020) untuk sektor pariwisata secara global menghasilkan beberapa kesimpulan salah satunya adalah negara Asia harus mengurangi ketergantungan pada wisatawan Cina. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana insentif pajak dapat merespons permasalahan dan langkah apa saja yang dapat diambil oleh pemerintah.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Creswell (dalam Rahadi, 2020) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang dilakukan untuk memahami permasalahan manusia atau sosial, di mana kegiatan dilakukan dengan memberikan gambaran secara komprehensif serta disajikan dalam bentuk narasi yang dilakukan secara alamiah. Dalam penelitian akan diuraikan bagaimana insentif pajak dalam merespons dampak negatif yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata.

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Khatibah dalam Sari & Asmendri (2020) mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sekaran (2016) menyatakan, data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada dan penulis bukan merupakan tangan pertama. Menurut Sekaran (2016) sumber data sekunder berasal dari catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, laman internet, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain:

- Literatur berupa buku yang terkait dengan penelitian
- Laporan resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah seperti BPS, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Pariwisata yang penulis dapatkan dari website resmi instansi tersebut
- Laporan resmi organisasi Internasional seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan World Travel and Tourism Council (WTTC) yang penulis dapatkan dari website resmi organisasi tersebut
- Berita dari media massa yang dapat diakses secara terbuka melalui internet
- Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan dan kepariwisataan

## Teknik Analisis

Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan seluruh informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap informasi tersebut berdasarkan teori, pernyataan ahli, dan keadaan di lapangan. Informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan pandemi COVID-19 dan insentif pajak apa saja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak tersebut. Selanjutnya membandingkan antara informasi tersebut dengan teori, pernyataan ahli, dan keadaan di lapangan sehingga dapat disimpulkan apa sajakah kebutuhan sektor pariwisata dalam menghadapi dampak negatif akibat pandemi COVID-19, apa saja manfaat insentif tersebut pada sektor pariwisata, dan alternatif solusi kebijakan insentif pajak dalam mengatasi masalah ekonomi pada sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini juga memuat studi kasus pada Provinsi Bali sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Provinsi Bali mengalami dampak akibat ketergantungan dengan Cina. Penulis menganggap perlu menguraikan studi ini lebih lanjut didasarkan bahwa Provinsi Bali merupakan daerah yang perekonomiannya ditopang dari sektor pariwisata, sehingga cukup representatif untuk dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan insentif pajak.

## 4. HASIL PENELITIAN

### 4.1. Kebutuhan Sektor Pariwisata Menghadapi Dampak Negatif Akibat Pandemi Covid-19

#### Sektor Pariwisata dan Perekonomian Indonesia

Sektor Pariwisata merupakan kegiatan ekonomi yang penting di sebagian besar negara di dunia. Selain dampak ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung, industri ini juga memiliki dampak tidak langsung dan induksi yang signifikan (WTTC, 2018). WTTC (2019) dalam laporannya menyebutkan bahwa sektor sektor pariwisata tumbuh sebesar 3,9% pada tahun 2018, lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2%. Hal tersebut melebihi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan selama delapan tahun berturut-turut. Persentase tenaga kerja yang terserap karena adanya pariwisata secara global adalah sebesar 10% dari pekerjaan yang ada di dunia, termasuk yang berasal dari sektor yang tidak berkontribusi secara langsung terhadap pariwisata (turunan sektor pariwisata).

Realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional berdasarkan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (NESPARNAS) untuk tahun 2017 sebesar 4,11%. Sementara pada tahun 2016 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional sebesar 4,13%. Pada tahun 2018, devisa sektor pariwisata mencapai Rp229,5 triliun atau meningkat 15,4 persen secara tahunan. Berdasarkan NESPARNAS 2017, pajak atas produksi neto yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata mencapai Rp4,18 triliun atau memberi sumbangan pada pajak atas produksi neto nasional sebesar 3,79

persen. Sumbangan terbesar diberikan oleh pengeluaran wisatawan nusantara yang mencapai 1,52%, konsumsi wisatawan mancanegara 1,21%, investasi pariwisata 0,99%, pengeluaran *pre* dan *post trip* dari wisatawan Indonesia ke luar negeri dan pengeluaran promosi pariwisata masing-masing 0,05% dan 0,03% (BPS, 2019).

Berdasarkan laporan WTTC pada tahun 2017, Indonesia adalah negara dengan peringkat ke 87 dari 185 negara untuk penyerapan tenaga kerja dalam sektor pariwisata. Sektor pariwisata secara langsung menyerap sebanyak 4.585.000 pekerjaan (3,7% dari total pekerjaan). Peranan upah dan gaji dari kegiatan pariwisata terhadap nilai kompensasi tenaga kerja secara nasional pada tahun 2017 sebesar Rp 171,66 triliun atau 3,88 persen terhadap upah nasional (BPS, 2017).

### Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha pada Sektor Pariwisata

Seluruh pelaku usaha pariwisata secara umum terdampak secara langsung dengan adanya pandemi COVID-19. Dampak ini disebabkan oleh seiring dengan dibatasinya wisatawan, penerbangan, dan ditutupnya tempat wisata. Sehingga menimbulkan gangguan pada rantai nilai dunia usaha sehingga banyak usaha pada berbagai sektor dan skala usaha yang berhenti operasi sementara atau permanen. Berikut adalah tantangan yang dialami oleh Usaha Pariwisata berdasarkan kajian OECD (2020).

#### 1. Transportasi dan Jasa Perjalanan

- a) Penerbangan  
Maskapai penerbangan secara drastis harus mengurangi dan dalam beberapa kasus menghentikan armada mereka serta menghentikan aktivitas mereka.
- b) Pelayaran  
Perusahaan pelayaran menghadapi tantangan ganda untuk memastikan keamanan pengunjung dan pekerja, karena beberapa kapal pesiar tidak dapat bersandar dan memulangkan klien, serta mengalami kerugian karena pembatalan pemesanan.
- c) Perkeretaapian  
Karena pergerakan orang dibatasi, perkeretaapian mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.
- d) Jasa Perjalanan  
Jasa perjalanan mengalami penurunan pendapatan seiring dengan dibatasinya wisatawan, penerbangan, dan ditutupnya tempat wisata.

#### 2. Jasa Akomodasi dan Kuliner

Usaha seperti Hotel, Platform Pemesanan Akomodasi (Hotel, Penerbangan, Penginapan), Resort, dan Restoran mengalami penurunan pendapatan seiring dengan dibatasinya

wisatawan, penerbangan, dan ditutupnya tempat wisata.

### Perubahan Perilaku Konsumen Saat Pandemi COVID-19

Bohlen et al (2020) menyatakan ketika berada di tengah krisis, konsumen cenderung mengutamakan harga yang lebih murah. Dalam situasi normal, konsumen biasanya mengutamakan nilai ketimbang harga. Namun, di saat krisis, konsumen memerlukan alasan yang lebih kuat untuk membeli sesuatu dengan harga tinggi.

Mankiw (2007) menjelaskan 10 prinsip ekonomi yang digunakan seseorang untuk mengambil keputusan. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pertimbangan ketika krisis misalnya orang akan tanggap terhadap insentif dan orang yang rasional akan berpikir tentang *margin*. Pergeseran perilaku konsumen dan prinsip ekonomi yang dikemukakan Bohlen et al (2020) dan Mankiw (2007) tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kebijakan pemerintah harus berorientasi untuk mendorong konsumsi yang anjlok akibat pandemi COVID-19.

### Studi Kasus Sektor Pariwisata di Provinsi Bali

Penulis memilih studi kasus sektor pariwisata di Provinsi Bali karena provinsi ini mengalami dampak akibat ketergantungan dengan Cina serta sektor pariwisata di provinsi tersebut keberadaannya sangat signifikan terhadap perekonomian regional. Sebagai salah satu contoh kabupaten Badung (salah satu kabupaten di Provinsi Bali) yang selama ini mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata, khususnya Pajak Hotel dan Restoran (PHR) mengalami penurunan pendapatan hingga 80 persen. Penutupan tempat wisata membuat kunjungan wisatawan anjlok. Sehingga berimbas pada berkurangnya pemasukan hotel dan restoran (Suarna, 2020).

Berdasarkan Laporan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali periode Mei 2020, terhentinya industri pariwisata menyebabkan penurunan permintaan terhadap bahan pangan. Lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum di Bali mengalami kontraksi pada triwulan laporan disebabkan oleh kinerja pariwisata yang menurun seiring dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Dilansir dari kumparan.com pariwisata di Bali berpotensi mengalami kerugian hingga USD9 miliar atau setara Rp139 triliun sampai dengan Rp140 triliun. Pariwisata di Bali mulai terimbas COVID-19 ini sejak Februari 2020. Sebagian besar surat kabar menuliskan bahwa sektor pariwisata di Pulau Bali anjlok sampai dengan 93%. Sehingga sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian yang ekstra terhadap sektor pariwisata dalam bentuk kebijakan insentif pajak mengingat dampaknya sangat mempengaruhi perekonomian daerah.

### Peran Pemerintah dalam Sektor Pariwisata

Kubickova dalam LPEM FEB UI (2019) menyatakan bahwa sektor pariwisata pada umumnya diinisiasi oleh

sektor swasta, namun sektor ini juga sangat bergantung pada dukungan pemerintah. Pemerintah perlu ikut serta dalam sektor pariwisata karena kontribusinya terhadap perekonomian. Selain itu dalam konsep tiga pilar utama dalam pariwisata, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan regulator. Dalam rangka melaksanakan fungsi regulator, pemerintah bertugas untuk membuat kebijakan publik pariwisata. Jenkins dalam Hall (2007) memberikan pendapat bahwa kebijakan publik pariwisata (*tourism public policy*) adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan sehubungan dengan pariwisata. Fungsi fasilitator salah satunya dalam strategi pengembangan produk pariwisata maupun promosi. Strategi dan promosi tersebut diperlukan untuk merespons perubahan pola konsumsi wisata mancanegara. Wisman tidak lagi terfokus hanya ingin santai dan menikmati *sun-sea and sand*, saat ini pola konsumsi mulai berubah ke jenis wisata yang lebih tinggi, yang meskipun tetap santai tetapi dengan selera yang lebih meningkat yakni menikmati produk atau kreasi budaya (*culture*) dan peninggalan sejarah (*heritage*) serta *nature* atau ekowisata dari suatu daerah atau Negara (Suwena & Widyatmaja, 2017). Menurut Hall (2007), sistem pariwisata terdiri dari 2 bagian besar yaitu *supply* dan *demand*. Suwena & Widyatmaja (2017) menyatakan bahwa *supply* sebagai subsistem dari sistem pariwisata terdiri dari komponen seperti industri pariwisata yang berkembang, kebijakan pemerintah baik nasional, bagian regional, maupun lokal, aspek sosial budaya serta sumber daya alam, dimana masing-masing sub sistem dan sub-sub sistem sebenarnya juga merupakan sistem tersendiri yang berinteraksi ke dalam dan ke luar. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah akan mempengaruhi sistem pariwisata di negara/daerah itu sendiri.

WTTC dalam Higgins & Desbiolles (2007) memberikan daftar apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pariwisata sebagai "*top priority*", antara lain sebagai berikut:

- Menempatkan *travel and tourism* sebagai masalah utama yang harus diangkat dalam perumusan kebijakan
- Menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif
- Memastikan bahwa data yang digunakan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan adalah data yang berkualitas
- Berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia
- Mempermudah / kebebasan perdagangan, transportasi, komunikasi dan investasi
- Membangun kepercayaan dalam hal keselamatan dan keamanan
- Mempromosikan *product diversification* untuk meningkatkan permintaan
- Merencanakan pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan, sesuai dengan budaya dan karakter setempat



- i. Berinvestasi untuk teknologi baru, seperti sistem navigasi satelit.

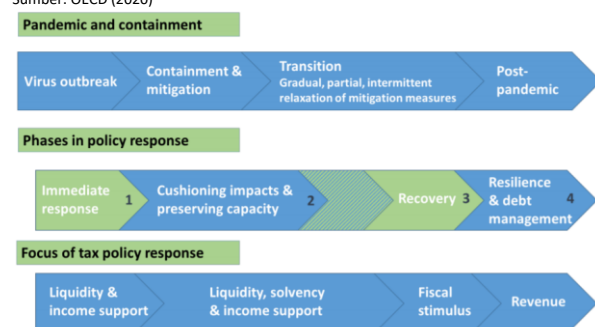
OECD (2020) memberikan pedoman dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam pemberian stimulus fiskal untuk mengatasi krisis ekonomi, pedoman tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Dukungan stimulus fiskal harus diberikan secara terus menerus, dan ditingkatkan seiring dengan fase pemulihan secara bertahap (*gradual recovery*)
- b. Periode pemberian stimulus selama *recovery phase* harus dipertimbangkan secara hati-hati dan harus tepat sasaran
- c. Koordinasi kebijakan akan membuat stimulus menjadi lebih efektif.

Tujuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini harus berfokus pada upaya untuk mengurangi krisis kesehatan secara langsung (OECD, 2020). Eichenbaum et al dalam OECD (2020) menyatakan bahwa atas fokus kebijakan tersebut membutuhkan pendanaan dan peningkatan fungsi sistem layanan kesehatan. Tantangan yang selanjutnya dihadapi adalah bagaimana pemerintah dapat mengurangi dampak atas *containment and mitigation* (contohnya *social distancing* dan *lockdowns*) yang terjadi pada rumah tangga dan pelaku bisnis. Pada tahapan yang lebih lanjut, pemerintah akan dihadapkan pada tantangan untuk memulihkan ekonomi dan memastikan bahwa pemulihan atas krisis yang terjadi dapat dilakukan secepat mungkin. Tantangan terakhir bagi pemerintah adalah memperkuat ketahanan sistem ekonomi dan kesehatan. Fase kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah selama dan pasca pandemi dapat dilihat pada Gambar 2.

**Gambar 2 Skema Fase Kebijakan selama dan pasca pandemi**

Sumber: OECD (2020)



OECD (2020) menyatakan bahwa pemulihan atas keuangan negara (penerimaan negara) seharusnya tidak datang terlalu dini untuk diprioritaskan sebagai kebijakan. Kebijakan dalam bidang pajak seharusnya terfokus pada dukungan stimulus yang kuat dan berkelanjutan. Hal tersebut secara tidak langsung akan mempercepat peningkatan penerimaan pajak setelah terjadinya krisis. Kemungkinan yang dihadapi setelah masa krisis adalah tantangan perpajakan atas ekonomi digital yang semakin meningkat dan perusahaan multinasional. Jawaban atas tantangan tersebutlah yang harus dipersiapkan pemerintah sejak saat ini.

Dalam Gambar 2 dapat dilihat bahwa OECD menempatkan penerimaan perpajakan sebagai fokus akhir kebijakan pajak. Dalam tahap pertama dukungan likuiditas dan penghasilan merupakan fokus utama yang dilanjutkan dengan dukungan solvabilitas. Ketiga dukungan tersebut diberikan dalam bentuk stimulus fiskal yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak setelah pandemi berakhir.

OECD (2020) menyatakan bahwa industri dan pemerintah selama masa pandemi/krisis lebih baik berfokus untuk mengidentifikasi prioritas utama dan memfasilitasi pemulihan dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Pedoman yang diberikan oleh WTTC tersebut menurut penulis sangatlah tepat digunakan pemerintah untuk membuat kebijakan setelah pandemi berakhir. Untuk perencanaan jangka pendek OECD (2020) menyatakan lebih baik berfokus pada perancangan rencana secara proaktif untuk kelangsungan hidup jangka pendek. Selama masa pandemi berlangsung orientasi pemerintah lebih tepat untuk memberikan dukungan likuiditas, income, dan solvabilitas dalam bentuk stimulus fiskal sembari menyiapkan strategi kebijakan setelah pandemi berakhir. Sebagai contoh berikut adalah kebijakan publik untuk sektor pariwisata yang dirangkum dari beberapa Negara:

- a. Memberikan subsidi atas gaji karyawan yang diberikan oleh usaha pariwisata
- b. Memberikan kemudahan untuk mengajukan pinjaman bagi pengusaha yang tergolong UMKM (dengan batasan omset tertentu)
- c. Mendukung UMKM untuk tetap membuka kesempatan pegawai magang, serta memberikan subsidi atas gaji yang diberikan
- d. Memberikan pembebasan pajak atas kredit yang diperoleh entitas bisnis yang memenuhi syarat dan batasan kredit tertentu
- e. Otoritas lokal (di Indonesia samadengan pemerintah daerah) menanggukhan pajak untuk akomodasi pariwisata
- f. Penundaan pembayaran bunga dan / atau pokok pinjaman
- g. Penundaan pembayaran jaminan sosial karyawan.

Kajian OECD sebelumnya bersesuaian dengan pendapat Nhamo (2020) terkait masalah utama dan membutuhkan paket stimulus pada sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19. Sehingga secara umum kebutuhan sektor pariwisata sesungguhnya adalah dukungan untuk menaikkan permintaan pada Usaha Pariwisata akibat menurunnya jumlah wisatawan, menjaga kestabilan arus kas, dan penanganan pemutusan hubungan kerja. Perubahan perilaku konsumen harus direspons oleh pemerintah dengan cara menerbitkan insentif pajak terbaru untuk menggenjot konsumsi. Selain itu insentif pajak diharapkan dapat mendukung kebijakan lainnya misalnya pembebasan pajak atas kredit. Dengan demikian, maka stimulus satu dengan lainnya dapat berjalan dengan selaras dan saling mendukung.



## 4.2. Insentif Pajak pada Sektor Pariwisata

### Gambaran Umum Insentif Pajak untuk Merespons Pandemi COVID-19

Selama pandemi COVID-19 hampir seluruh sektor usaha mengalami tekanan yang besar. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan berbagai stimulus ekonomi untuk mengurangi tekanan dan perbaikan perekonomian di Indonesia. Salah satu bentuk stimulus yang diberikan dalam bentuk stimulus fiskal adalah insentif pajak. Berikut daftar instrumen di bidang perpajakan khususnya insentif pajak yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam merespons COVID-19:

- a. PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (*telah dicabut dan diganti dengan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*)
- b. Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (*telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang*)
- c. PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

#### Subjek Penerima Insentif

1. Badan/Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19
  2. Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19
  3. Pihak Lain yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit untuk membantu penanganan pandemi COVID-19
  - d. PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*telah dicabut dan diganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disese 2019*)
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang
- Bentuk Insentif di Bidang Perpajakan :** penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:

1. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
2. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Wajib Pajak dalam negeri:

1. berbentuk Perseroan Terbuka;
2. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
3. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 30% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

#### Bentuk Insentif

1. tambahan pengurangan penghasilan neto
  2. sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
  3. tambahan penghasilan yang diterima/diperoleh SDM di Bidang Kesehatan yang mendapat penugasan
  4. penghasilan berupa kompensasi & penggantian atas penggunaan harta
  5. pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
- Bentuk Insentif:** sama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 PP Nomor 30 tahun 2020 (merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020)
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disese 2019

#### Bentuk insentif

1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%
5. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah

### Insentif Pajak yang Dapat Dimanfaatkan Usaha Pariwisata

Insentif pajak yang dapat dinikmati oleh pengusaha di sektor pariwisata antara lain sebagai berikut.

#### a. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

##### Pokok Kebijakan

1. Penerima Insentif adalah pegawai yang menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu berdasarkan PMK 86/PMK.03/2020, memiliki NPWP, dan pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah
2. PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai
3. Dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan
4. PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak Masa Pajak pemberitahuan disampaikan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020
5. Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
6. Pemberitahuan pemanfaatan insentif (berdasarkan kriteria KLU), hanya diajukan oleh WP Pemberi Kerja yang berstatus pusat dan insentif berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh Pasal 21

Secara umum semua jenis Usaha Pariwisata beserta sektor turunannya dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

#### b. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah

##### Pokok Kebijakan

1. Penerima insentif merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
2. PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020
3. Penerima insentif wajib menyampaikan Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak (Wajib Pajak tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5%)
4. Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP termasuk dari transaksi dengan Pemotong/Pemungut

5. Untuk transaksi dengan pemotong/pemungut, Wajib Pajak menyerahkan fotokopi Surat Keterangan

Secara umum semua jenis usaha pariwisata beserta sektor turunannya yang tergolong dalam Wajib Pajak UMKM (PP Nomor 23 Tahun 2018) sesuai dapat memanfaatkan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

#### c. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%

##### Pokok Kebijakan

1. Penerima insentif adalah Wajib Pajak yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam PMK 86/PMK.03/2020
2. Pemerintah memberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh
3. Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sebagaimana Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum pada: SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (master file) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.
4. Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
5. Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
6. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 disampaikan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

Secara umum semua jenis usaha pariwisata beserta sektor turunannya dapat memanfaatkan insentif pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%.

### Manfaat Insentif Pajak pada Sektor Pariwisata

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diharapkan dapat mengurangi dampak pandemi COVID-19 yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja. Selain itu, syarat yang diberikan pemerintah yang meminta PPh Pasal 21 agar dibayarkan secara tunai menjadikan *take home pay* yang diperoleh pegawai menjadi lebih besar. Hal yang demikian diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga dapat roda perekonomian.

Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 dan PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah secara umum diharapkan dapat menjadikan arus kas perusahaan dalam keadaan yang stabil. Mengingat bahwa beban operasional dalam usaha yang terus berjalan tetapi pendapatan menurun, maka insentif ini sudah tepat diberikan kepada sektor pariwisata.

#### 4.3. Alternatif solusi kebijakan insentif pajak dalam mengatasi masalah ekonomi pada sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19

Penulis merangkum jenis permasalahan yang sebagai besar dihadapi oleh Usaha Pariwisata serta bagaimana respons pemerintah dalam kerangka kebijakan bentuk insentif pajak yang dapat dilihat pada Tabel 1. Pemutusan hubungan kerja telah direspons pemerintah dalam bentuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Dukungan terhadap kestabilan arus kas telah tercermin pada kebijakan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 dan PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

**Tabel 1. Jenis Permasalahan Usaha Pariwisata dan Respons yang Diberikan Pemerintah**

No	Jenis Permasalahan	Respons Pemerintah (Insentif Pajak)
1.	Dukungan untuk menaikkan permintaan	Belum terdapat respons
2.	Pemutusan hubungan kerja	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
3.	Perubahan perilaku konsumen dalam konsumsi	Belum terdapat respons
4.	Likuiditas Usaha Pariwisata (Kredit Usaha)	Belum terdapat respons
5.	Kestabilan Arus Kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25</li> <li>PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah</li> </ul>

Berkaitan dengan jenis permasalahan yang belum direspons pemerintah dalam kerangka kebijakan insentif pajak, maka penulis mencoba memberikan rekomendasi antara lain dengan memberikan insentif PPN kepada Pengusaha di Sektor Pariwisata untuk mengatasi masalah perubahan perilaku konsumen dalam konsumsi serta memberikan dukungan untuk menaikkan permintaan, dan memberikan akses yang mudah melalui *fintech lending* bagi pengusaha di sektor pariwisata yang tidak memiliki akses terhadap perbankan.

#### Memperkuat Sektor Pariwisata dengan *Fintech Lending*

Salah satu kebutuhan Usaha Pariwisata untuk mempertahankan bisnisnya adalah dukungan likuiditas

dengan cara memberikan kemudahan akses terhadap kredit usaha. Pemerintah dapat menggandeng *fintech lending* dalam rangka memberikan akses permodalan bagi mereka yang membutuhkan, tak terkecuali para pekerja atau pengusaha di sektor pariwisata. *Fintech Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Pasal 1 ayat (3) POJK Nomor 77/POJK.01/2016). Sering kali kelompok tersebut tidak memiliki akses ke pihak perbankan karena sulit terpenuhinya persyaratan formal yang diminta oleh pihak perbankan. Sehingga disinilah pemerintah dapat hadir untuk memberikan akses bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pihak perbankan dengan menggandeng *fintech lending*. Di Indonesia sendiri per 30 April 2020 terdapat 161 platform *Fintech Lending* dengan rincian 33 platform yang telah berizin dan 128 lainnya dengan keterangan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi utama *fintech lending* secara umum untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung. Pihak yang bertransaksi sesungguhnya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, bukan antara penerima pinjaman dan platform *fintech lending*.

Kebijakan umum yang dapat diambil oleh pemerintah antara lain:

- Menggandeng *fintech lending* dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar realisasi penyerapan KUR di Indonesia sesuai dengan target yang telah ditetapkan
  - Mengakomodir penerima pinjaman yang tidak memiliki NPWP untuk tetap dapat memanfaatkan *fintech lending* untuk mendapatkan pinjaman, selanjutnya berdasarkan data yang telah diperoleh *fintech lending* diterbitkan NPWP secara jabatan oleh otoritas pajak, setelah pandemi berakhir WP tersebut dapat dilakukan ekstensifikasi
  - Menetapkan batas maksimum terbaru bunga pinjaman yang dapat dikenakan terhadap peminjam dana selama masa pandemi COVID-19
- Kebijakan terkait dengan insentif pajak yang dapat diambil oleh pemerintah antara lain:

- Memberikan insentif pajak kepada pihak *fintech lending* atas penghasilan platform *fintech lending* yang bersumber dari pinjaman oleh peminjam dana yang tergolong UMKM dan sektor yang terdampak COVID-19 termasuk sektor pariwisata.
- Memberikan insentif pajak berupa pengurangan tarif atau pembebasan pajak terhadap pendapatan bunga yang diterima oleh pemberi pinjaman atas pinjaman yang diterima peminjam dana yang tergolong UMKM

## Menggagas Insentif Pajak Pertambahan Nilai untuk Pengusaha di Sektor Pariwisata

Dalam ruang lingkup usaha pariwisata pada Pasal 14 Undang-undang RI nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, terdapat beberapa jenis jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai (sebagai jasa tidak dikenakan pajak pertambahan nilai sesuai dengan Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984, contohnya jasa kesenian dan hiburan). Misalnya saja jasa perjalanan wisata dan jasa konsultan pariwisata, jasa tersebut merupakan contoh jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Dalam PMK 121/PMK.03/2015, pada pasal 2 huruf k dinyatakan bahwa nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak pertambahan nilai untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih, maka penyedia jasa jenis ini harus memungut PPN sebesar 1% (tarif efektif) kepada pengguna jasa.

Ketika masa pandemi COVID-19, pengusaha jasa biro perjalanan wisata yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak akan menagihkan sebesar 101% dari harga penggantian kepada konsumen. Sehingga pengusaha jasa biro perjalanan wisata yang telah dikukuhkan menjadi PKP akan terkesan lebih mahal daripada pengusaha jasa biro perjalanan wisata yang belum dikukuhkan menjadi PKP. Hal ini akan menjadi pertimbangan penting seorang pelanggan untuk memilih penyedia jasa yang akan digunakan ketika masa pandemi.

Sampai dengan kajian ini dibuat, penulis belum menemukan kebijakan pemerintah dalam bentuk insentif pajak pertambahan nilai bagi sektor pariwisata/usaha pariwisata selain restitusi PPN dipercepat sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020. Penulis berpendapat bahwa pemberian insentif pajak pertambahan nilai kepada sektor pariwisata akan memberikan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan sektor tersebut. Pemberian insentif tersebut akan mengurangi beban administratif dan menjadikan persaingan usaha yang sehat antar pengusaha di bidang pariwisata terutama di masa pandemi COVID-19. Insentif dapat berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau pembebasan dari kewajiban pembayaran. Sehingga dengan adanya insentif ini diharapkan dapat menaikkan permintaan dan dapat mengatasi perubahan perilaku konsumen dalam konsumsi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, kebutuhan sektor pariwisata dalam menghadapi dampak negatif akibat pandemi COVID-19 antara lain: (i) dukungan untuk menaikkan permintaan pada Usaha Pariwisata akibat menurunnya jumlah wisatawan, (ii) menjaga kestabilan arus kas, (iii) penanganan

pemutusan hubungan kerja, (iv) penanganan terhadap perubahan perilaku konsumsi konsumen, dan (v) dukungan insentif pajak pada saat melakukan kredit usaha. Manfaat insentif pajak bagi Usaha Pariwisata pada Sektor Pariwisata antara lain: (i) mengurangi terjadinya PHK secara masal dan mendorong konsumsi rumah tangga (dengan diberikannya insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)), (ii) menjaga kestabilan arus kas Usaha Pariwisata (dengan diberikannya insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah dan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%).

Permasalahan yang belum direspon oleh pemerintah dalam bentuk insentif pajak adalah bagaimana agar permintaan dan konsumsi Usaha Pariwisata pada sektor pariwisata dapat naik, serta memberikan akses kemudahan kredit untuk likuiditas perusahaan. Alternatif solusi kebijakan insentif pajak dalam mengatasi masalah ekonomi pada sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19 yang dapat diadopsi oleh pemerintah dalam rangka menaikkan permintaan dan konsumsi Usaha Pariwisata adalah dengan cara memberikan insentif PPN dalam bentuk ditanggung pemerintah atau pembebasan dari kewajiban pembayaran. Alternatif solusi kebijakan insentif pajak untuk memberikan akses kemudahan kredit antara lain: (i) memberikan insentif pajak kepada pihak *fintech lending* atas penghasilan *platform fintech lending* yang bersumber dari pinjaman oleh peminjam dana yang tergolong UMKM dan sektor yang terdampak COVID-19 termasuk sektor pariwisata, dan (ii) memberikan insentif pajak berupa pengurangan tarif atau pembebasan pajak terhadap pendapatan bunga yang diterima oleh pemberi pinjaman atas pinjaman yang diterima peminjam dana yang tergolong UMKM.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Secara umum diharapkan jurnal ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan khususnya dalam bidang insentif pajak kepada seluruh pemangku kepentingan, baik dalam lingkup eksekutif maupun legislatif. Kajian ini memiliki keterbatasan dalam penulisan. Keterbatasan tersebut disebabkan karena terbatasnya data yang tersedia untuk periode pandemi berlangsung. Hal tersebut dapat mengakibatkan kemungkinan rekomendasi yang penulis berikan belum dapat mengakomodir kondisi lapangan secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hall, Colin Michael. 2007. *Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships*. England: Prentice Hall
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *The Principles of Economics*. USA: Cengage Learning.
- Rahadi, Dedi Rianto. (2020). *Konsep Penelitian Kualitatif*. Bogor: PT. Filda Fikrindo.
- Sekaran, Uma and Roger Bougie. (2016). *Research methods for business a skill building approach*.

New York: John Wiley & Sons.

Suwena, I Ketut & I Gusti Ngurah Widyatmaja. (2017). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Universitas Udayana.

UN & CIAT. (2018). *Design And Assessment Of Tax Incentives In Developing Countries*. New York: United Nations & the Inter-American Center of Tax Administrations.

Zed, M. (2004). *Metode peneletian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

#### Laporan

BPS. (2019). *Neraca Satelit Pariwisata Nasional (NESPARNAS) 2017*.

BPS. (2020). *Statistik Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional 2020 Periode Mei 2020*.

Bank Indonesia. (2020). *Laporan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali*.

Kementerian Pariwisata. (2018). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017*.

LPEM FEB UI. (2019). *Kajian Prioritisasi dan Pengarusutamaan Sektor Pariwisata*.

LPEM FEB UI. (2018). *Kajian Awal Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia*.

OECD. (2020). *Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience*. OECD

WTTC . (2019). *Travel & Tourism Economic Impact 2019*.

WTTC . (2018). *Travel & Tourism Economic Impact 2018 Indonesia*.

#### Jurnal

Almuttaqi, A. I. (2020). Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia. *The Insights*, 13.

Anderson, R. M., Heesterbeek, H., Klinkenberg, D., & Hollingsworth, T. D. (2020). How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?. *The Lancet*, 395(10228), 931-934.

Budiyanti, E. (2020). Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan Dan Pariwisata Indonesia. *Info Singkat XII*, (4).

Bohlen, B., Carlotti, S., & Mihas, L. (2010). How the recession has changed US consumer behavior. *McKinsey Quarterly*, 1(4), 17-20.

Budastra, I. K. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 dan Program Potensial untuk Penanganannya: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Agrimansion*, 21(1), 48-57.

Chirinko, R. S. (2000). Investment tax credits

Gourinchas, P. O. (2020). Flattening the pandemic and recession curves. *Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever*, 31.

Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.

Higgins, F & Desbiolles. (2007). Capitalist globalisation, corporated tourism and their alternatives. In *Tourism Management In The 21st Century* Nova Science Publishers.

Nhamo, G., Dube, K., & Chikodzi, D. (2020). Tourism

Economic Stimulus Packages as a Response to COVID-19. In *Counting the Cost of COVID-19 on the Global Tourism Industry* (pp. 353-374). Springer, Cham.

Qiu, Y., Chen, X., & Shi, W. (2020). Impacts of social and economic factors on the transmission of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China. *Journal of Population Economics*, 1.

Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41-53.

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., ... & Chen, L. K. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45-67.

Zu, Z. Y., Jiang, M. D., Xu, P. P., Chen, W., Ni, Q. Q., Lu, G. M., & Zhang, L. J. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a perspective from China. *Radiology*, 200490.

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang

Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahir Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
- Website**
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020, March 02). *Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Januari 2020 mencapai 1,27 juta kunjungan*. Retrieved from Katadata website: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/03/02/1712/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-januari-2020-mencapai-1-27-juta-kunjungan-.html>
- Bayu, Dimas Jarot. (2020, April 19). *Kadin: Sektor Pariwisata Paling Terdampak Corona, Ribuan Hotel Tutup*. Retrieved from Katadata website: <https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9c3e548dc39/kadin-sektor-pariwisata-paling-terdampak-corona-ribuan-hotel-tutup>
- Detikcom. (2020, April 26). *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?*. Retrieved from Detikcom website: <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>
- Kumparan.com. (2020). Retrieved from Kumparan Bisnis website: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pariwisata-bali-anjlok-akibat-corona-kerugian-ditaksir-capai-rp-139-triliun-1t130luExol>
- OECD. (2020). *Tourism Policy Responses to the coronavirus (COVID-19)*. Retrieved from OECD website: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tourism-policy-responses-to-the-coronavirus-COVID-19-6466aa20/>
- Sagita, Nafilah Sri. (2020, August 14). *DKI Tertinggi, Ini Sebaran 2.307 Kasus Baru Corona Indonesia 14 Agustus*. Retrieved from Detikcom website: <https://Health.Detik.Com/Berita-Detikhealth/D-5133264/Dki-Tertinggi-Ini-Sebaran-2307-Kasus-Baru-Corona-Indonesia-14-Agustus>
- Situmorang, Anggun P. (2020, June 30). *Sri Mulyani: Corona Beri 3 Dampak Besar ke Ekonomi Indonesia*. Retrieved from Liputan6 website: <https://Www.Liputan6.Com/Bisnis/Read/4292763/Sri-Mulyani-Corona-Beri-3-Dampak-Besar-Ke-Ekonomi-Indonesia>
- Suarna, Nyoman. (2020, May 18). *Realisasi Pendapatan Badung Jauh Dari Target, Baru Capai 20 Persen*. Retrieved from Bali Express website: <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/05/18/194922/realisasi-pendapatan-badung-jauh-dari-target-baru-capai-20-persen>
- Suhud, R. (2020). *Ini Perkiraan Pemulihan Sektor Pariwisata Menurut LPEM FEB-UI*. Media Indonesia. Retrieved from Media Indonesia website: <https://mediaindonesia.com/read/detail/304859-ini-perkiraan-pemulihan-sektor-pariwisata-menurut-lpem-feb-ui>
- Waseso, Ratih. 2020. *Wishnutama usulkan insentif PPh 25 hingga 100% bagi sektor wisata dan ekonomi kreatif*. Retrieved from The Hartford website: <https://nasional.kontan.co.id/news/wishnutama-usulkan-insentif-pph-25-hingga-100-bagi-sektor-wisata-dan-ekonomi-kreatif>